

Editor:
Rianto
Fariel Zulfikar Alman



KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA EMAS 2045



Tim Penulis:
Lukman Yudho Prakoso | Asep Iwa Soemantri | Heru Prasetyo

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA EMAS 2045

Tim Penulis:

Lukman Yudho Prakoso | Asep Iwa Soemantri | Heru Prasetyo



KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA EMAS 2045

Tim Penulis:

Lukman Yudho Prakoso
Asep Iwa Soemantri
Heru Prasetyo

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Rianto
Fariel Zulfikar Alman

ISBN:

978-623-500-257-6
978-623-500-256-9 (PDF)

Cetakan Pertama:

Juni, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, "Kebijakan Pertahanan Negara Indonesia Emas 2045," dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai bagian dari upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045, yakni mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Buku ini dirancang untuk memberikan panduan komprehensif mengenai kebijakan pertahanan negara yang akan mendukung pencapaian visi tersebut. Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi dan dinamika geopolitik yang cepat berubah, kebijakan pertahanan negara harus dirumuskan secara sistematis dan berbasis pada teori-teori kebijakan yang kokoh.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap isu pertahanan negara. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan pertahanan yang berbasis teori, diharapkan kita semua dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi pembangunan pertahanan negara yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2024

Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso., S.I.P., M.A.P., M.Tr.Opsla., IPU., ASEAN Eng

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR DAN TEORI KEBIJAKAN NEGARA	1
A. Teori-Teori Dasar Kebijakan Negara	2
B. Mekanisme Pembuatan Kebijakan Negara	3
C. Kebijakan Pertahanan dan Kebijakan Bidang Lainnya	5
BAB 2 MODEL DAN PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN NEGARA	7
A. Model dan Pendekatan	8
B. Pokok-Pokok Kebijakan Negara	9
C. Pokok-Pokok Kebijakan Pertahanan Negara	11
BAB 3 KEBIJAKAN MARITIM	13
A. Kajian Pokok-Pokok Kebijakan Maritim	14
B. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Kebijakan Pertahanan Maritim	15
C. Studi Kasus Kebijakan Maritim di Indonesia	17
D. Model Kebijakan Maritim di Negara Lain	18
E. Kebijakan Maritim Indonesia Emas 2045	19
F. Landasan Teori Kebijakan Maritim	21
G. Dikotomi Doktrin Negara Maritim dan Negara Kontinental	23
H. Kebijakan Maritim dan Kebijakan Pertahanan Pulau Besar	26
BAB 4 KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL	29
A. Tentang Kedaulatan Negara	30
B. Tentang Yurisdiksi Nasional	31
C. Permasalahan Sumber Daya Nasional, Yang Berkaitan Dengan Ancaman dan Permasalahan Kedaulatan Negara	32
D. Hilirisasi Pengelolaan Sumber Daya Nasional	34
BAB 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POSTUR PERTAHANAN MILITER	37
A. Konsep Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer	38
B. Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer Dalam Penerapan dan Perspektif Strategi Pertahanan Laut	39
C. Kendala Pembangunan Postur Pertahanan Militer Dalam Penerapan dan Perspektif Strategi Pertahanan Laut	40
D. Model Negara Asing Dalam Pembangunan Pertahanan Militer	42

BAB 6 KEBIJAKAN PENERAHAN PERTAHANAN NIRMILITER	45
A. Dasar Kebijakan Negara Terkait Pertahanan Nirmiliter.....	46
B. Konsep Pertahanan Nirmiliter	47
C. Konsep Penerahan Pertahanan Nirmiliter.....	48
D. Permasalahan Dalam Penerahan Pertahanan Nirmiliter	50
E. Leading Sektor Pertahanan Nirmiliter	51
BAB 7 KEBIJAKAN PENERAHAN PERTAHANAN MILITER.....	57
A. Kebijakan Negara Terkait Pertahanan Militer	58
B. Konsep Pertahanan Militer.....	59
C. Konsep penerahan pertahanan Militer	60
D. Permasalahan yang Dihadapi Pertahanan Militer.....	62
E. Strategi Terbaik Pertahanan Militer Indonesia Emas 2045	63
F. Peran Diplomasi Pertahanan Negara Untuk Mendukung Indonesia Emas 2045.....	67
G. Integrasi Kebijakan Pertahanan Militer dan Nonmiliter.....	70
H. Kebijakan Negara Komponen Cadangan	73
I. Kebijakan Komponen Pendukung Pertahanan	76
BAB 8 KEBIJAKAN KERJASAMA INTERNASIONAL BIDANG PERTAHANAN	81
A. Dinamika Lingkungan Strategis	82
B. Tantangan Kebijakan Bidang Pertahanan Indonesia Emas 2045	85
C. Teori Tentang Kebijakan Kerjasama Internasional Bidang Pertahanan	86
D. Macam dan Jenis Kerjasama Internasional Bidang Pertahanan.....	87
E. Studi Kasus Kerjasama Internasional Bidang Pertahanan	89
BAB 9 KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN	91
A. Landasan Hukum Kebijakan Industri Pertahanan.....	91
B. Landasan Teori Kebijakan Industri Pertahanan	93
C. Kebijakan Industri Pertahanan Laut Perbandingan di Negara Lain.....	95
D. Tantangan Kebijakan Industri Pertahanan ke Depan	98
BAB 10 KEBIJAKAN PERTAHANAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN.....	101
A. Landasan Hukum Tentang Kebijakan Pertahanan Pengamanan Wilayah Perbatasan.....	101
B. Landasan Teori Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan.....	103
C. Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan Perbandingan di Negara Lain.....	105
D. Studi Kasus Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan.....	106

BAB 11 KEBIJAKAN PENGAMANAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR	109
A. Landasan Hukum Tentang Kebijakan Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar	110
B. Landasan Teori Kebijakan Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar	111
C. Kebijakan Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar Perbandingan di Negara Lain	112
D. Studi Kasus Kebijakan Pengamanan Pulau-pulau Kecil Terluar	113
BAB 12 KEBIJAKAN WILAYAH PERTAHANAN	115
A. Landasan Hukum Tentang Kebijakan Wilayah Pertahanan	117
B. Landasan Teori Kebijakan Wilayah Pertahanan	119
C. Kebijakan Wilayah Pertahanan Perbandingan di Negara Lain	120
D. Studi Kasus Kebijakan Wilayah Pertahanan	124
BAB 13 KEBIJAKAN LOGISTIK PERTAHANAN	127
A. Landasan Kebijakan Logistik Pertahanan	129
B. Landasan Teori Kebijakan Logistik Pertahanan	130
C. Perbandingan Logistik Pertahanan di Negara Lain	132
D. Studi Kasus Kebijakan Logistik Pertahanan	134
BAB 14 KEBIJAKAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAHANAN	137
A. Kebijakan Anggaran dan Pengawasan Pertahanan	137
B. Landasan Hukum Kebijakan Anggaran dan Pengawasan Bidang Pertahanan	138
C. Landasan Teori Kebijakan Anggaran dan Pengawasan Bidang Pertahanan	140
D. Studi Kasus Kebijakan Anggaran dan Pengawasan Bidang Pertahanan	141
BAB 15 KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA EMAS 2045	143
A. Pendahuluan	143
B. Dinamika Lingkungan Strategis 2045	144
C. Kebijakan Pertahanan Negara 2045	146
D. Implementasi Kebijakan Pertahanan Negara 2045 Berdasarkan Teori Lukman Yudho Prakoso	148
E. Hambatan Implementasi Kebijakan Pertahanan Negara 2045 Berdasarkan Teori Lukman Yudho Prakoso	151
DAFTAR PUSTAKA	154

BAB 1

PENGANTAR DAN

TEORI KEBIJAKAN NEGARA

Kebijakan negara adalah seperangkat rencana, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan pendidikan hingga lingkungan dan keamanan nasional. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam memahami kebijakan negara:¹

Tujuan: Setiap kebijakan negara dibuat dengan tujuan tertentu. Tujuan ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, dan bisa meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Proses Pembuatan Kebijakan: Proses pembuatan kebijakan melibatkan serangkaian langkah yang kompleks. Ini bisa termasuk pengumpulan data, analisis masalah, pembahasan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), penyusunan rancangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan implementasi serta evaluasi kebijakan tersebut.

Pengambil Keputusan: Kebijakan negara biasanya diambil oleh badan atau lembaga pemerintah yang berwenang, seperti kabinet, parlemen, atau lembaga eksekutif. Proses pengambilan keputusan dapat melibatkan berbagai aktor, termasuk pejabat pemerintah, ahli kebijakan, akademisi, dan kelompok kepentingan lainnya.

Implikasi: Setiap kebijakan negara memiliki implikasi yang bisa signifikan bagi masyarakat dan ekonomi. Implikasi ini bisa bersifat positif maupun negatif, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti lapangan pekerjaan, harga barang dan jasa, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Evaluasi dan Revisi: Kebijakan negara harus dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini dapat mengarah pada revisi atau perubahan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya.

¹ BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/157950/perpres-no-8-tahun-2021>, diakses tanggal 6 Mei 2024

BAB 2

MODEL DAN PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN NEGARA

Analisis kebijakan negara adalah proses evaluasi dan pemahaman terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dalam berbagai bidang kebijakan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dibentuk, diimplementasikan, dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan.⁴

Dalam analisis kebijakan negara, beberapa langkah yang umumnya dilakukan meliputi:

Identifikasi Isu atau Masalah: Identifikasi masalah atau isu yang menjadi fokus kebijakan negara. Hal ini bisa meliputi masalah ekonomi, keamanan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, atau isu-isu lain yang dianggap penting oleh pemerintah.

Analisis Kebutuhan dan Tujuan: Menganalisis kebutuhan yang mendasari pembentukan kebijakan serta tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam menangani isu tersebut.

Penelusuran Alternatif Kebijakan: Menelusuri berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk menangani isu atau masalah yang ada. Setiap alternatif kebijakan memiliki konsekuensi dan dampak yang berbeda, sehingga perlu dipertimbangkan dengan seksama.

Evaluasi Kebijakan yang Ada: Mengevaluasi kebijakan yang sudah ada atau sedang diterapkan oleh pemerintah untuk melihat efektivitas, efisiensi, dan relevansinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perumusan Kebijakan Baru: Jika diperlukan, merumuskan kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang sudah ada berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Implementasi Kebijakan: Melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan, termasuk alokasi sumber daya, pembuatan regulasi, dan pelaksanaan program-program yang terkait.

⁴ BPSDM Sulawesi Selatan, <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah>, diakses tanggal 6 Mei 2024.

BAB 3

KEBIJAKAN MARITIM

Kebijakan Maritim adalah serangkaian langkah dan strategi yang dirancang oleh suatu negara untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya dan wilayah lautnya, melindungi keamanan dan kedaulatan maritim, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah maritim tersebut. Kebijakan Maritim mencakup berbagai aspek, termasuk pertahanan maritim, pengelolaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur maritim, pengembangan ekonomi maritim, perlindungan lingkungan laut, kerjasama maritim regional dan internasional, serta pemberdayaan masyarakat maritim.⁸

Secara umum, kebijakan maritim bertujuan untuk:

Memanfaatkan potensi sumber daya laut: Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut seperti ikan, minyak dan gas bumi, mineral, energi terbarukan, serta kekayaan biologis lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara dan masyarakat yang bergantung pada laut.

Melindungi kedaulatan dan keamanan maritim: Mempertahankan kedaulatan negara di wilayah lautnya, melindungi perbatasan maritim dari ancaman seperti invasi militer, pencurian sumber daya, dan tindakan ilegal lainnya, serta mengatasi ancaman keamanan seperti terorisme maritim dan perdagangan ilegal.

Mengelola lingkungan laut secara berkelanjutan: Menerapkan kebijakan dan praktik yang mendukung pelestarian ekosistem laut, mengurangi pencemaran laut, memulihkan habitat terumbu karang, dan mengatasi dampak perubahan iklim terhadap laut.

Meningkatkan konektivitas maritim: Membangun infrastruktur maritim seperti pelabuhan, dermaga, jalur pelayaran, dan fasilitas transportasi laut lainnya untuk meningkatkan konektivitas antar-pulau, memfasilitasi perdagangan laut, dan mendukung pariwisata maritim.

Mendorong pembangunan ekonomi maritim: Mengembangkan sektor-sektor ekonomi maritim seperti perikanan, kelautan, pariwisata, industri galangan kapal, logistik, dan perdagangan internasional untuk menciptakan

⁸ Universitas Indonesia, <https://www.ui.ac.id/lima-pilar-kebijakan-maritim-untuk-menjadi-poros-maritim-dunia/>, diakses tanggal 6 Mei 2024

BAB 4

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL

Pengelolaan sumber daya nasional adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara secara berkelanjutan dan optimal. Sumber daya nasional meliputi berbagai aset alam seperti hutan, lahan, air, mineral, energi, dan sumber daya laut yang menjadi bagian penting dari kekayaan negara dan keberlanjutan pembangunan.¹³

Pengelolaan sumber daya nasional melibatkan beberapa aspek penting, termasuk:

Pengelolaan Berbasis Ekosistem: Memperhatikan kelestarian ekosistem dan keseimbangan alam dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pelestarian habitat, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Pemanfaatan Berkelanjutan: Memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Regulasi dan Pengawasan: Menerapkan regulasi yang tepat dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal, perusakan lingkungan, dan penyalahgunaan sumber daya lainnya.

Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dan komunitas adat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, dan pembagian manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam.

Pembangunan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah, lembaga pengelolaan lingkungan, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui pelatihan, pendidikan, dan transfer teknologi.

¹³ BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/123685/uu-no-23-tahun-2019>, diakses tanggal Mei 2024.

BAB 5

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POSTUR PERTAHANAN MILITER

Postur pertahanan militer mengacu pada struktur, kemampuan, dan kesiapan militernya suatu negara untuk melindungi diri dari ancaman yang mungkin timbul dari dalam maupun luar negeri. Ini mencakup berbagai aspek termasuk kekuatan personel, peralatan militer, strategi pertahanan, dan kebijakan keamanan nasional yang ditetapkan oleh suatu negara.

Berikut adalah beberapa komponen penting dari postur pertahanan militer:¹⁷

Kekuatan Personel: Postur pertahanan militer melibatkan jumlah dan kualitas personel militer yang dimiliki oleh suatu negara, termasuk angkatan darat, laut, udara, serta unit khusus dan pasukan cadangan. Ini termasuk juga pelatihan dan kesiapan personel untuk berbagai skenario konflik.

Peralatan dan Teknologi: Postur pertahanan militer mencakup peralatan militer seperti pesawat tempur, kapal perang, kendaraan tempur, senjata, dan peralatan komunikasi yang digunakan untuk operasi militer dan pertahanan wilayah. Peralatan ini harus dipelihara dengan baik dan diperbaharui secara teratur untuk memastikan kesiapan militer.

Strategi Pertahanan: Ini mencakup strategi dan doktrin pertahanan yang diterapkan oleh suatu negara untuk melindungi wilayahnya dari ancaman, baik itu dalam bentuk serangan militer konvensional, serangan teroris, atau ancaman cyber. Strategi ini dapat meliputi doktrin penggunaan kekuatan, penempatan pasukan, dan integrasi alat pertahanan nasional.

Kesiapan Operasional: Postur pertahanan militer juga mencakup kesiapan operasional angkatan bersenjata dalam menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Ini meliputi latihan militer, pemeliharaan peralatan, perencanaan operasi, dan pengawasan atas posisi dan aktivitas musuh potensial.

Kebijakan Keamanan Nasional: Kebijakan keamanan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah juga merupakan bagian penting dari postur pertahanan militer. Ini mencakup penentuan prioritas keamanan, alokasi sumber daya, kerjasama pertahanan internasional, serta upaya diplomasi untuk mencegah konflik dan memperkuat kerja sama keamanan regional.

¹⁷ Prabowo Subiyanto, <https://www.kemhan.go.id/poathan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html>, tanggal 6 Mei 2024.

BAB 6

KEBIJAKAN PENERAPAN PERTAHANAN NIRMILITER

Pertahanan nirmiliter merujuk pada serangkaian strategi, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan tanpa menggunakan kekuatan militer secara langsung. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan instrumen-instrumen non-kekerasan dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.²²

Berikut adalah beberapa elemen kunci dari pertahanan nirmiliter:

Diplomasi: Diplomasi adalah instrumen utama dalam pertahanan nirmiliter. Negara menggunakan diplomasi untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, memfasilitasi dialog, mediasi konflik, dan mencapai kesepakatan diplomatik dalam rangka mencapai kepentingan nasional tanpa perlu menggunakan kekuatan militer.

Kerjasama Internasional: Kerjasama internasional merupakan bagian integral dari pertahanan nirmiliter. Negara bekerja sama dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan lembaga internasional untuk memperkuat keamanan regional dan global, membangun kepercayaan, dan mengatasi tantangan bersama seperti terorisme, perdagangan manusia, dan perubahan iklim.

Pengembangan Kapasitas Non-Militer: Pertahanan nirmiliter mencakup pengembangan kapasitas dalam bidang-bidang non-militer seperti pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketidakesetaraan, dan menciptakan kondisi yang mendukung stabilitas dan perdamaian.

Diplomasi Ekonomi: Pertahanan nirmiliter juga melibatkan penggunaan diplomasi ekonomi untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Ini termasuk kerjasama ekonomi, investasi asing, perdagangan internasional, dan sanksi ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku negara lain tanpa perlu menggunakan kekuatan militer.

²² Lemhanas RI, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000162/swf/4233/files/basic-html/page8.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.

BAB 7

KEBIJAKAN PENGERAHAN PERTAHANAN MILITER

Pertahanan militer adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara atau entitas untuk melindungi wilayahnya, kepentingan nasional, serta masyarakatnya dari ancaman, serangan, atau agresi dari luar. Ini melibatkan penggunaan kekuatan militer, termasuk pasukan darat, laut, udara, dan sumber daya terkait lainnya, untuk mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keamanan dalam negeri.²⁷

Pertahanan militer memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

Mempertahankan Kedaulatan dan Wilayah: Pertahanan militer bertujuan untuk melindungi wilayah suatu negara dari invasi atau agresi militer dari pihak luar. Ini mencakup pertahanan terhadap serangan darat, laut, dan udara yang bertujuan untuk menguasai atau merampas wilayah suatu negara.

Menjaga Keamanan dan Stabilitas: Pertahanan militer juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri dengan menanggulangi ancaman dalam negeri, termasuk pemberontakan, terorisme, atau kejahatan bersenjata lainnya. Hal ini mencakup pengamanan perbatasan, pemeliharaan ketertiban umum, dan penegakan hukum.

Menjamin Kedaulatan Maritim dan Udara: Bagi negara yang memiliki wilayah maritim atau udara yang luas, pertahanan militer juga bertujuan untuk menjaga kedaulatan di sektor tersebut. Ini termasuk patroli laut, pengawasan udara, dan penegakan hukum di wilayah-wilayah tersebut.

Mendukung Kebijakan Luar Negeri: Pertahanan militer dapat digunakan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk dalam hal menjaga kemitraan dan aliansi, memberikan bantuan militer kepada negara-negara sahabat, atau berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional.

Pertahanan militer sering kali merupakan bagian integral dari strategi keamanan nasional suatu negara dan dapat melibatkan berbagai aspek, mulai dari persenjataan dan pelatihan militer hingga strategi perencanaan pertahanan yang lebih luas.

²⁷ STEM, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pertahanan_militer, diakses tanggal 6 Mei 2024.

BAB 8

KEBIJAKAN KERJASAMA INTERNASIONAL BIDANG PERTAHANAN

Dalam era globalisasi dan dinamika ancaman keamanan yang semakin kompleks, kerjasama internasional di bidang pertahanan menjadi elemen strategis yang vital. Indonesia, sebagai negara dengan posisi geopolitik yang strategis, menghadapi berbagai tantangan keamanan yang tidak hanya bersifat domestik tetapi juga regional dan global. Oleh karena itu, kebijakan kerjasama internasional di bidang pertahanan dirumuskan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan nasional melalui sinergi dengan negara lain dan organisasi internasional³¹.

Tujuan:

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapabilitas dan kesiapan pertahanan nasional melalui aliansi strategis dan kemitraan.
2. Meningkatkan pertukaran informasi intelijen dan teknologi militer.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui latihan bersama dan program pendidikan.
4. Mendukung stabilitas dan perdamaian regional serta global.

Strategi Implementasi:

Aliansi dan Kemitraan Strategis:

1. Menjalin dan memperkuat aliansi dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan lainnya.
2. Mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam latihan militer bersama serta operasi perdamaian internasional.
3. Pertukaran Informasi dan Teknologi:
4. Meningkatkan kerjasama dalam bidang intelijen untuk menghadapi ancaman terorisme, keamanan siber, dan kejahatan lintas negara.
5. Melakukan transfer teknologi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan negara-negara maju dalam bidang pertahanan.

³¹Kemenkomarves RI, <https://jdih.maritim.go.id/uu-32023-pengesahan-perjanjian-kerja-sama-bidang-pertahanan-antara-ri-singapura>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

BAB 9

KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN

Dengan berkembangnya dinamika global yang semakin kompleks dan beragam, keamanan dan kedaulatan suatu negara menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran. Industri pertahanan memegang peranan vital dalam mendukung upaya tersebut. Kebijakan industri pertahanan dirancang untuk memperkuat kemampuan militer melalui pengembangan teknologi, produksi peralatan militer, dan pengurangan ketergantungan pada impor.³⁹

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan industri pertahanan, terutama dalam konteks Indonesia yang tengah berupaya mencapai kemandirian strategis di bidang pertahanan. Visi Indonesia Emas 2045 menuntut kesiapan pertahanan yang kokoh, didukung oleh industri pertahanan yang mandiri dan maju.

Kebijakan ini meliputi berbagai aspek mulai dari investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), kemitraan strategis dengan negara dan perusahaan internasional, penguatan industri lokal, penerapan regulasi yang mendukung, hingga pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Semua ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri pertahanan yang inovatif, berdaya saing, dan mampu memenuhi kebutuhan militer nasional.

A. LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN

Kebijakan industri pertahanan Indonesia didasarkan pada berbagai landasan hukum yang memberikan kerangka kerja bagi pengembangan, regulasi, dan implementasi industri pertahanan nasional. Berikut adalah beberapa landasan hukum utama yang menjadi dasar bagi kebijakan industri pertahanan di Indonesia:⁴⁰

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
 - Pasal 30: Menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
 - Pasal 27 Ayat (3): Menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

³⁹ KKIP, <https://www.kkip.go.id/tentang-kami/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

⁴⁰

Setneg

RI,

https://www.setneg.go.id/view/index/komite_kebijakan_industri_pertahanan_1 diakses tanggal 13 Mei 2024

BAB 10

KEBIJAKAN PERTAHANAN

PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

Wilayah perbatasan memiliki arti strategis yang sangat penting bagi kedaulatan negara. Tidak hanya sebagai garis pemisah antara negara, tetapi juga sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Indonesia dengan negara tetangga. Pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif dan efisien akan menjamin integritas teritorial, keamanan nasional, serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di daerah perbatasan.⁴⁴

Kebijakan pertahanan pengamanan wilayah perbatasan tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup keamanan non-tradisional, pembangunan infrastruktur, serta kerjasama internasional. Dalam dokumen ini, kami mencoba merangkum berbagai strategi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang di wilayah perbatasan, mulai dari penguatan pos perbatasan, peningkatan patroli, hingga pengembangan kerjasama dengan negara tetangga.

A. LANDASAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

Dasar hukum kebijakan pertahanan pengamanan wilayah perbatasan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan teknis lainnya. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang terkait dengan kebijakan tersebut:⁴⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 25A: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang."

⁴⁴ Kemensesneg RI,
https://www.setneg.go.id/view/index/badan_nasional_pengelola_perbatasan_1 diakses
tanggal 1 Mei 2024

⁴⁵ B.A. Oktavira, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-wilayah-indonesia-lt623c508fde9c6/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

BAB 11

KEBIJAKAN PENGAMANAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Kebijakan pengamanan pulau-pulau kecil terluar menjadi salah satu fokus penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah maritim suatu negara. Pulau-pulau kecil terluar sering kali rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk ancaman dari negara asing yang mengklaim wilayah perairan terdekat, kegiatan ilegal seperti pencurian ikan, dan masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan bencana alam. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terpadu untuk mengamankan pulau-pulau kecil terluar.⁴⁹

Deskripsi kebijakan pengamanan pulau-pulau kecil terluar mencakup beberapa aspek penting:

Penguatan Keberadaan Fisik: Pemerintah melakukan penguatan infrastruktur fisik di pulau-pulau kecil terluar, termasuk pembangunan pos pengamanan, pangkalan militer, dan fasilitas komunikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran negara di wilayah tersebut dan memberikan deteksi dini terhadap ancaman potensial.

Peningkatan Patroli dan Pengawasan: Melakukan patroli reguler dan pengawasan terhadap perairan di sekitar pulau-pulau kecil terluar menggunakan kapal patroli, pesawat udara, dan teknologi pengawasan seperti radar dan kamera. Hal ini bertujuan untuk mencegah aktivitas ilegal dan mengidentifikasi ancaman potensial dengan cepat.

Penguatan Kerjasama Regional: Negara yang memiliki pulau-pulau kecil terluar sering kali menjalin kerjasama regional dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan bersama. Kerjasama ini melibatkan pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, dan peningkatan koordinasi operasional antar negara.

Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pengamanan pulau-pulau kecil terluar dengan membentuk kelompok keamanan rakyat, memberikan pelatihan keamanan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan wilayah.

⁴⁹ BNPP, <https://bnpp.go.id/berita/pengamanan-pulau-kecil-terluar-di-perbatasan-negara>, diakses tanggal 14 Mei 2024.

BAB 12

KEBIJAKAN WILAYAH PERTAHANAN

Kebijakan wilayah pertahanan merupakan rangkaian tindakan, strategi, dan kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, serta keamanan nasional dari ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari kekuatan militer, intelijen, diplomasi, hingga kerjasama internasional. Berikut adalah deskripsi tentang kebijakan wilayah pertahanan:⁵¹

a. Tujuan Utama

1. Melindungi Kedaulatan: Memastikan bahwa wilayah dan perbatasan negara tidak dilanggar oleh pihak asing.
2. Menjaga Integritas Teritorial: Mencegah dan mengatasi setiap ancaman yang dapat mengganggu kesatuan dan keutuhan wilayah negara.
3. Keamanan Nasional: Menjamin keamanan warga negara dari ancaman fisik, baik itu dari militer asing, kelompok teroris, atau ancaman lainnya.

b. Komponen Utama

1. Militer: Pengembangan dan pemeliharaan angkatan bersenjata yang kuat dan siap tempur. Ini mencakup pelatihan, persenjataan, teknologi, dan strategi militer.
2. Intelijen: Pengumpulan dan analisis informasi untuk mendeteksi dan mencegah ancaman sebelum menjadi masalah besar.
3. Pertahanan Sipil: Mempersiapkan masyarakat dan infrastruktur untuk tanggap darurat dalam situasi krisis, seperti serangan, bencana alam, atau kerusuhan.
4. Diplomasi: Kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional serta global.

⁵¹ BRIN, <https://www.brin.go.id/news/113199/brin-bahas-kebijakan-penataan-wilayah-pertahanan-negara>, diakses tanggal 14 Mei 2024

BAB 13

KEBIJAKAN LOGISTIK PERTAHANAN

Kebijakan Logistik Pertahanan adalah serangkaian peraturan, strategi, dan prosedur yang diterapkan oleh suatu negara untuk memastikan bahwa angkatan bersenjata mereka memiliki sumber daya yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Ini mencakup pengelolaan aliran material, personel, informasi, dan layanan dari titik asal ke titik penggunaan, baik selama masa damai maupun konflik. Berikut adalah beberapa komponen utama dari kebijakan logistik pertahanan:⁵²

1. Pengadaan dan Penyediaan Sumber Daya

Kebijakan logistik pertahanan melibatkan proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung operasi militer, termasuk:

Peralatan dan Persenjataan: Pembelian, pemeliharaan, dan penggantian peralatan militer seperti kendaraan, pesawat, kapal, senjata, dan amunisi.
Perbekalan dan Material: Penyediaan barang-barang seperti bahan bakar, suku cadang, makanan, pakaian, dan perlengkapan medis.

2. Transportasi dan Distribusi

Proses logistik tidak hanya tentang mendapatkan barang, tetapi juga mengirimkannya ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ini mencakup:

Transportasi Militer: Penggunaan berbagai moda transportasi (darat, laut, udara) untuk mengangkut pasukan dan material.

Rantai Pasokan: Sistem distribusi yang memastikan aliran barang yang efisien dari gudang ke unit yang membutuhkan di garis depan atau lokasi operasi lainnya.

3. Manajemen Persediaan

Kebijakan ini mencakup pengelolaan persediaan untuk memastikan bahwa barang-barang penting selalu tersedia, tetapi tanpa menumpuk persediaan berlebih yang dapat membebani biaya dan ruang.

Inventarisasi: Penggunaan sistem manajemen inventaris untuk melacak barang-barang yang masuk dan keluar.

Pergudangan: Penyimpanan yang efisien dan aman untuk peralatan dan perbekalan.

⁵² Kemhan RI, <https://www.kemhan.go.id/itjen/inspektorat-logistik>, diakses tanggal 14 Mei 2024

BAB 14

KEBIJAKAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAHANAN

Kebijakan anggaran dan pengawasan bidang pertahanan adalah kerangka kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur alokasi dana, pengelolaan keuangan, dan pengawasan pengeluaran yang berkaitan dengan sektor pertahanan suatu negara. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan penggunaan yang efisien, efektif, dan akuntabel dari sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk keperluan pertahanan negara. Ini mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam menjaga keamanan nasional.⁵⁵

A. KEBIJAKAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN PERTAHANAN

Kebijakan anggaran dan pengawasan bidang pertahanan di Indonesia merujuk pada kerangka kerja yang mengatur alokasi dana, pengelolaan keuangan, dan pengawasan pengeluaran yang terkait dengan pertahanan negara. Hal ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Alokasi Anggaran Pertahanan:

Pemerintah Indonesia menentukan jumlah dana yang akan dialokasikan untuk keperluan pertahanan dalam anggaran negara. Dana ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembelian peralatan militer, pemeliharaan fasilitas pertahanan, operasi militer, dan pelatihan personel.

2. Prioritas Pengeluaran:

Dana anggaran pertahanan dialokasikan berdasarkan prioritas nasional dan keamanan. Hal ini mencakup modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), pengadaan sistem pertahanan udara, pembangunan pangkalan militer, dan pemeliharaan infrastruktur pertahanan.

3. Pengawasan dan Akuntabilitas:

Kebijakan ini menetapkan standar pengawasan dan akuntabilitas yang ketat terhadap pengeluaran dana pertahanan. Ini mencakup pembentukan lembaga pengawasan, audit rutin, serta pelaporan yang

⁵⁵ Kemenkeu RI, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/data-publikasi/publikasi-kppn/berita-terbaru/2988-analisis-kinerja-anggaran-belanja-kementerian-pertahanan.html>, diakses tanggal 14 Mei 2024

BAB 15

KEBIJAKAN PERTAHANAN

NEGARA INDONESIA EMAS 2045

A. PENDAHULUAN

Indonesia Emas 2045 adalah visi jangka panjang yang dicanangkan untuk menandai 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi ini mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan pertahanan. Kebijakan pertahanan negara menjadi salah satu elemen kunci dalam memastikan tercapainya visi tersebut, mengingat pentingnya stabilitas dan keamanan nasional sebagai fondasi bagi pembangunan berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki tantangan geografis yang unik dalam hal pertahanan. Keberagaman etnis, budaya, dan agama, serta posisi geostrategis di antara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai titik strategis yang rentan terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan yang komprehensif dan adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks.

Pendekatan pertahanan Indonesia menuju 2045 harus mencakup peningkatan kapabilitas militer, penguatan industri pertahanan nasional, serta pengembangan kerjasama internasional. Peningkatan kapabilitas militer mencakup modernisasi alutsista (alat utama sistem senjata), peningkatan profesionalisme prajurit, serta pengembangan teknologi pertahanan yang inovatif. Penguatan industri pertahanan nasional bertujuan untuk mencapai kemandirian dalam penyediaan alutsista dan peralatan militer lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing global Indonesia.

Selain itu, kebijakan pertahanan juga harus memperhatikan aspek non-militer seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme, dan mitigasi bencana. Ancaman siber menjadi semakin nyata di era digital, sehingga pengembangan kapabilitas pertahanan siber menjadi prioritas untuk melindungi infrastruktur kritis nasional. Penanggulangan terorisme dan ekstremisme memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan dan pendidikan. Sementara itu, mitigasi bencana menjadi penting mengingat Indonesia berada di wilayah rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav, and Barry Buzan, eds. "The Making of Global International Relations: Origins and Evolution of IR at Its Centenary." Cambridge University Press, 2019.
- Aniisa Mardian, <https://annisamardiana.wordpress.com/2012/10/28/model-dan-pendekatan-dalam-analisis-kebijakan-publik/>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Antara, <https://www.antaraneews.com/berita/3753006/tni-al-proyeksikan-kekuatan-2025-2045-soroti-ancaman-modernv>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Arad, Uzi (2018). National Security: The Israeli Experience. State University of New York Press.
- Arad, Uzi (2018). National Security: The Israeli Experience. State University of New York Press.
- Art, Robert J. dan Kenneth N. Waltz (eds.). 2009. "The Use of Force: Military Power and International Politics." New York: Rowman & Littlefield.
- B.A. Oktavira, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-wilayah-indonesia-lt623c508fde9c6/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.
- Bappenas,
<https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Rencana%20Pembangunan%20dan%20Rencana%20Kerja%20Pemerintah>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Baylis, John, James J. Wirtz, dan Colin S. Gray (eds.). 2016. "Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies." New York: Oxford University Press.
- Bellamy, Alex J., and Matt McDonald. "The Utility of Human Security: Sovereignty and Humanitarian Intervention." Security Dialogue, vol. 33, no. 3, 2002, pp. 373-387.
- Betts, Richard K. 2017. "American Force: Dangers, Delusions, and Dilemmas in National Security." New York: Columbia University Press.
- BNPP, <https://bnpp.go.id/berita/pengamanan-pulau-kecil-terluar-di-perbatasan-negara>, diakses tanggal 14 Mei 2024.
- Boot, Max. 2003. "The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power." Basic Books.
- BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/123685/uu-no-23-tahun-2019>, diakses tanggal Mei 2024.

- BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/157950/perpres-no-8-tahun-2021>, diakses tanggal 6 Mei 2024
- BPSDM Sulawesi Selatan, <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- BRIN, <https://www.brin.go.id/news/113199/brin-bahas-kebijakan-penataan-wilayah-pertahanan-negara>, diakses tanggal 14 Mei 2024
- Brooks, Stephen G., G. John Ikenberry, dan William C. Wohlforth (eds.). 2013. "The Oxford Handbook of the International Relations of Asia." Oxford University Press.
- Bruneau, Thomas C., and Florina Cristiana Matei.** "The Impact of Budget Constraints on Military Capability Development." *Journal of Military Studies*, vol. 7, no. 3, 2014, pp. 331-350.
- Brzoska, Michael. "Defense Budgeting in a Changing World." *Journal of Peace Research*, vol. 30, no. 2, 1993, pp. 171-187.
- Budgeting for National Defense: Allocating Resources in an Era of Fiscal Constraints
- Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. 1998. "Security: A New Framework for Analysis." Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Buzan, Barry. "New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century." *International Affairs*, vol. 67, no. 3, 1991, pp. 431-451.
- Buzan, Barry. "People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era." ECPR Press, 2007.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). "Indonesia's Role in Southeast Asian Security Architecture." Research
- Chairil Nur Siregar, Sutiadi Rahmansyah, Epin Saepudin, <https://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/23933>, diakses tanggal 14 Mei 2024
- Civil-Military Relations in National Security Policy: A Comparative Analysis
CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20220926105707-14-374915/tantangan-membumikan-industri-pertahanan-di-indonesia>, diakses tanggal 13 Mei 2024
- Cohen, Eliot A. "Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime." Free Press, 2002.
- Cohen, Eliot A. 2008. "Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime." Simon & Schuster.
- Connie Rahakundini Bakrie, https://lib.litbang.kemendagri.go.id/index.php?p=show_detail&id=726&keywords=, diakses tanggal 6 Mei 2024.

- Cordesman, Anthony H.** "The Oversight and Accountability in Defense Spending." *Defense & Security Analysis*, vol. 25, no. 1, 2009, pp. 1-20.
- Cornelis, <https://kalbarprov.go.id/berita/cornelis-perbedaan-harus-menjadi-kekuatan-pertahanan-negara-nirmiliter.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Council on Foreign Relations - National Security. (<https://www.cfr.org/topic/national-security>)
- Defense Research Center. "Future Defense Strategy for Indonesia 2045." Research Report, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), 2019.
- Department of Defense (United States). (<https://www.defense.gov/>)
- Dunne, J. Paul, and Eftychia Nikolaidou.** "Military Spending, Economic Growth and Investment." *Defence and Peace Economics*, vol. 12, no. 5, 2001, pp. 459-474.
- European Defence Agency.** "Defense Spending and Fiscal Responsibility: A Comparative Analysis."
- Evaluating the Effectiveness of National Defense Strategies: Case Studies and Methodological Approaches"
- Fettweis, Christopher J. 2009. "Dangerous Times?: The International Politics of Great Power Peace." Georgetown University Press.
- Fisip UI, <https://fisip.ui.ac.id/en/implementasi-kebijakan-industri-pertahanan-indonesia-dalam-mendukung-pertahanan-udara/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.
- Fisip UI, <https://fisip.ui.ac.id/en/implementasi-kebijakan-industri-pertahanan-indonesia-dalam-mendukung-pertahanan-udara/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.
- Freedman, Lawrence. 2013. "Strategy: A History." Oxford University Press.
- Galula, David. 2006. "Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice." Praeger.
- Ghosh, Amiya Kumar.** "Defense Budgeting and Financial Management: Perspectives on Military Spending." Routledge, 1999.
- Gompert, David C. 2017. "War with China: Thinking Through the Unthinkable." Rand Corporation.
- Gramedia BI, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>, diakses tanggal 6 Mei 2024
- Gramedia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/kerja-sama-internasional/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.
- Gray, Colin S. 1999. "Modern Strategy." New York: Oxford University Press.
- Hartley, Keith, and Todd Sandler.** "The Economics of Defense." Cambridge University Press, 1995.

- Hernandos, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/40856>, diakses tanggal 13 Mei 2024
- Hooker, Gregory.** "Evaluating Defense Budgeting and Financial Management Systems." *International Journal of Public Administration*, vol. 34, no. 3, 2011, pp. 204-220.
- Humanitarian Interventions and National Security: Legal and Ethical Considerations"
- Huntington, Samuel P. 1996. "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order." Simon & Schuster.
- Huxley, Tim. "Defending the Lion City: The Armed Forces of Singapore." Allen & Unwin, 2000.
- Inspektorat Subar, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portofolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 14 Mei 2024
- Inspektorat Subar, <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portofolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 14 Mei 2024
- Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) (2019). "National Security Strategy 2020 of India: New Vision, New Direction.
- Institute for National Security Studies (Israel). (<https://www.inss.org.il/en/>)
- International Conference on Defense Management and Budgeting.** Proceedings, 2022.
- JDIH Kemenko Marves RI, <https://jdih.maritim.go.id/en/wilayah-yurisdiksi-indonesia>, diakses tanggal 6 Mei 2024
- Johnston, Alastair Iain dan Robert S. Ross (eds.). 2014. "New Directions in the Study of China's Foreign Policy." Stanford University Press.
- Jones, Emily R. (2019). "National Security and Public Health: Challenges and Opportunities." *International Journal of Health Policy and Management*, 8(9), 517-519.
- Kagan, Robert. 2007. "The Return of History and the End of Dreams." New York: Alfred A. Knopf.
- Kapstein, Ethan B. dan Michael Mastanduno (eds.). 2007. "Unipolar Politics: Realism and State Strategies After the Cold War." Columbia University Press.
- Kemhan RI, <https://www.kemhan.go.id/2015/06/12/kementerianlembaga-menjadi-unsur-utama-menghadapi-ancaman-pertahanan-nirmiliter.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Kemhan RI, <https://www.kemhan.go.id/baranahan/2024/03/06/rapim-uo-kemhan-tahun-2024.html>, diakses tanggal 3 Mei 2024

- Kemenkeu RI, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/data-publikasi/publikasi-kppn/berita-terbaru/2988-analisis-kinerja-anggaran-belanja-kementerian-pertahanan.html>, diakses tanggal 14 Mei 2024
- Kemenkomarves RI, <https://jdih.maritim.go.id/uu-32023-pengesahan-perjanjian-kerja-sama-bidang-pertahanan-antara-ri-singapura>, diakses tanggal 13 Mei 2024.
- Kemensesneg RI, https://www.setneg.go.id/view/index/badan_nasional_pengelola_perbatasan_1 diakses tanggal 1 Mei 2024
- Kementerian Pertahanan Indonesia.** "Laporan Anggaran dan Manajemen Pertahanan 2023."
- Kementrian MSDM RI, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-3-kedaulatan-negara-dalam-pengusahaan-migas>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Kemhan RI, <https://www.kemhan.go.id/itjen/inspektorat-logistik>, diakses tanggal 14 Mei 2024
- Kemhan RI, <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2021/06/WIRA-MASTER-JAN-FEB2021-rev-JAKUMHANEG-19april2021INDONESIAKomplit.pdf>, diakses tanggal 6 Mei 2024
- Kemlu RI, https://kemlu.go.id/portal/id/page/22/kerja_sama_bilateral, diakses tanggal 1 Mei 2024.
- Khairul Fahmi, <https://news.detik.com/kolom/d-5810714/melihat-cadangan-logistik-pangan-dari-sudut-pandang-pertahanan> diakses tanggal 14 Mei 2024
- Kilcullen, David. 2009. "The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One." Oxford University Press.
- Kim, Sung Hee (2018). "National Security: Fundamental Principles and Global Challenges." *Asian Journal of Political Science*, 26(2), 157-174.
- KKIP, <https://www.kkip.go.id/tentang-kami/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.
- Kominfo, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/12/08111711/konsep-pertahanan-rakyat-semesta-lima-tahun-ke-depan-ala-prabowo?page=all>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Laksmiana, Evan A. "Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?" *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, vol. 33, no. 2, 2011, pp. 157-182.

- Lemhanas RI, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000162/swf/4233/files/basic-html/page8.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Lemhanas RI, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1698-kelemahan-industri-pertahanan-indonesia-stagnasi-alokasi-anggaran-ekosistem-industri-penelitian-dan-pengembangan-serta-skala-ekonomi>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Mabes TI, <https://tni.mil.id/view-4979-postur-tni-sesuai-undang-undang-no34-tahun-2004.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Mabes TNI, <https://tni.mil.id/view-4979-postur-tni-sesuai-undang-undang-no34-tahun-2004.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Mahan, Alfred Thayer. 2013. "The Influence of Sea Power Upon History, 1660–1783." Dover Publications.
- Mahkamah Konstitusi RI, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17608>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Mearsheimer, John J. 2001. "The Tragedy of Great Power Politics." W.W. Norton & Company.
- Meese, Michael J., Kugler, Richard L., & Matthews, F. Matt (2019). Understanding National Security. Routledge.
- Menlhk, https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/tahapan_pembuatan_kebijakan.html, diakses tanggal 6 Mei 2024
- Ministry of Defence (India). (<https://mod.gov.in/>)
- Ministry of Defence (United Kingdom). (<https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence>)
- Ministry of Defence of the Republic of Indonesia. "Indonesia Defence Policy." Website
- Ministry of Defence of the Republic of Indonesia. "Indonesia's Defense White Paper 2015." Presented at the International Defense Conference, Jakarta, 2015.
- Muhammad Ridwan, <https://www.kemhan.go.id/poathan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-hayati-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- National Security Policy: Challenges and Opportunities in the 21st Century O'Hanlon, Michael (2019). National Security: A Jeremiad.
- Pape, Robert A. 2010. "Bombing to Win: Air Power and Coercion in War." Cornell University Press.

- Posen, Barry R. 2014. "Restraint: A New Foundation for U.S. Grand Strategy." Cornell University Press.
- Prabowo Subiyanto, <https://www.kemhan.go.id/poathan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html>, tanggal 6 Mei 2024.
- Prakoso, Lukman Yudho, and Iqbal Arbi. "Assessment of Indonesia's Defense Capabilities and Future Requirements." Indonesian Defense University, 2020.
- Prakoso, Lukman Yudho. "Integrating National Defense Policy for Indonesia Emas 2045." *Journal of Strategic and Global Studies*, vol. 3, no. 1, 2020.
- Prakoso, Lukman Yudho. "Strategic Defense Initiatives for Indonesia 2045." Presented at the National Defense Seminar, University of Indonesia, 2021.
- Public Opinion and National Security Policy: Understanding the Dynamics of Support and Opposition
- Regional Security Cooperation and Collective Defense: Case Studies and Best Practices
- Renshon, Stanley A., Suedfeld, Peter, & Ladd, Everett (2017). *National Security in the Obama Administration: Reassessing the Bush Doctrine*. Palgrave Macmillan.
- Richard A.** "Fiscal Oversight and Efficiency in Defense Spending." *Public Budgeting & Finance*, vol. 28, no. 2, 2008, pp. 25-45.
- Ripsman, Norrin M., and T.V. Paul. "Globalization and the National Security State." Oxford University Press, 2010.
- Rose, Gideon. 2014. "How Wars End: Why We Always Fight the Last Battle." Simon & Schuster.
- Ross, Andrew L.** "The Political Economy of Defense: Issues and Perspectives." Greenwood Press, 1991.
- Rumsfeld, Donald. 2011. "Known and Unknown: A Memoir." Sentinel.
- Sandler, Todd dan Keith Hartley. 2007. "Handbook of Defense Economics." Volume 2. Amsterdam: North Holland.
- Sandy Nur, <https://ipsh.brin.go.id/2013/01/22/kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan/>, diakses tanggal 14 Mei 2024.
- Sandy Nur, <https://ipsh.brin.go.id/2013/01/22/kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan/>, diakses tanggal 14 Mei 2024
- Sasmini, <https://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/11/03/pengelolaan-dan-pengamanan-pulau-pulau-terluar-indonesia/>, diakse tanggal 14 Mei 2024.
- Shultz, Richard H., Roy Godson, dan Ted Gover. 2008. "Security Studies for the 21st Century." Potomac Books

- Sjafrie Sjamudien, <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/24/tni-harus-siap-perang-berlarut>, diakses tanggal 14 Mei 2024
- Smith, John A. (2020). "The Role of National Security in Economic Development." *Journal of Security Sector Management*, 12(2), 135-150.
- Snow, Donald M. (2018). *National Security: Policymaking and Implementation*. Oxford University Press.
- Snyder, Glenn H. dan Paul D. Diesing. 2014. "Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crises." Princeton University Press.
- STEM, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pertahanan_militer, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Storr, Jim dan Larry P. Goodson (eds.). 2004. "Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban." University of Washington Press.
- Strategic Defense Planning: Lessons Learned and Future Directions"
- Suryadinata, Leo. "ASEAN and the Geopolitical Dynamics in Asia." Presented at the ASEAN Security Summit, Singapore, 2019.
- The Jakarta Post. "Indonesia Aims for Comprehensive Defense Strategy by 2045." Article
- The Role of Technology in Shaping National Security Policy: Trends and Implications.
- The White House (2017). "National Security Strategy of the United States of America."
- Tni.mil.id, <https://tni.mil.id/view-2707-diplomasi-pertahanan-indonesia-as.html>, diakses tanggal 13 Mei 2024.
- Tommy Amin Santoso, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/10305>, diakses tanggal 13 Mei 2024.
- U.S. Department of Defense.** "Defense Budget Overview: Fiscal Year 2024."
- Universitas Indonesia, <https://www.ui.ac.id/lima-pilar-kebijakan-maritim-untuk-menjadi-poros-maritim-dunia/>, diakses tanggal 6 Mei 2024
- Universitas Katoik Parahyangan, <https://unpar.ac.id/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-bagaimana-tantangan-dan-perkembangannya/>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Universitas Katoik Parahyangan, <https://unpar.ac.id/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-bagaimana-tantangan-dan-perkembangannya/>, diakses tanggal 6 Mei 2024.

- Univrsits Pattmiura, <https://unpatti.ac.id/2021/08/09/permasalahan-dan-solusi-sekitar-industri-maritim-di-wilayah-perairan-indonesia/>, diakses tanggal 6 Mei 2024.
- Walt, Stephen M. 2018. "The Hell of Good Intentions: America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy." New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Waltz, Kenneth N. 2001. "Man, the State, and War: A Theoretical Analysis." New York: Columbia University Press.
- Widyantoro, Agung. "Evaluating Indonesia's Military Modernization Efforts." Research Paper, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 2018.
- Williams, Michael C. "Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics." *International Studies Quarterly*, vol. 47, no. 4, 2003, pp. 511-531.
- Wohlforth, William C. 2015. "America Abroad: The United States' Global Role in the 21st Century." Oxford University Press.
- Yarger, H. R. "Toward a Theory of Strategy: Art Lykke and the Army War College Strategy Model." U.S. Army War College, 2010.
- Yarger, Harry R. "Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy." Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2006.
- Zakheim, Dov S., Daniel Goure, dan David A. Ochmanek. 2001. "A Vulcan's Tale: How the Bush Administration Mismanaged the Reconstruction of Afghanistan." Potomac Books.

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA EMAS 2045

Buku ini menawarkan pandangan mendalam tentang visi strategis pertahanan Indonesia menuju tahun 2045. Mulai dari pengantar teori kebijakan negara hingga berbagai model dan pendekatan analisis kebijakan, buku ini menjelaskan landasan kuat yang diperlukan untuk membangun sistem pertahanan yang tangguh dan responsif. Pembaca akan diajak memahami berbagai kebijakan penting seperti kebijakan maritim, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembangunan postur pertahanan militer dan nirmiliter. Dengan menyoroti kebijakan kerjasama internasional, industri pertahanan, dan pengamanan wilayah perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar, buku ini menggambarkan bagaimana Indonesia mempersiapkan diri menghadapi tantangan global. Setiap bab dikemas dengan analisis komprehensif dan pendekatan praktis, memberikan gambaran jelas tentang upaya pembangunan wilayah pertahanan yang terintegrasi. Penekanan pada kebijakan logistik, anggaran, dan pengawasan bidang pertahanan memastikan setiap langkah strategis dieksekusi dengan efisiensi dan transparansi. Sinopsis ini menggambarkan buku sebagai panduan esensial bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan siapa saja yang peduli dengan masa depan pertahanan Indonesia. Dengan visi Indonesia Emas 2045, buku ini menjadi sumber inspirasi untuk mencapai kemandirian dan keunggulan dalam bidang pertahanan, menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap menghadapi segala ancaman dan tantangan di masa depan. "Bersiap menuju masa depan yang lebih aman dan berdaulat" menjadi kalimat yang mengilhami keseluruhan karya ini.